

SKRIPSI

Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau



Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM : 175310634

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

SKRIPSI

Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



Oleh:

**MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM : 175310634**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Analisis Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Ditemukan program yang tidak berjalan dan belum mencapai target di LAKIP Bappeda oleh karena itu, perlu mengukur kinerja atas program tersebut secara ekonomi, efisien, efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Bappeda Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019. Teknik pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan metode *value for money* yang terdiri dari pengukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Hasil penelitian yang pertama, tingkat rasio ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa rata-rata rasio ekonomi $<100\%$ artinya, program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau dinilai ekonomis. Kedua, tingkat rasio efisiensi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi $>100\%$ artinya, program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau dinilai efisien. Sedangkan, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi $<100\%$ artinya program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau dinilai tidak efisien. Ketiga, tingkat rasio efektivitas pada tahun 2018 dan 2019 dengan menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas $<100\%$ artinya, indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau dinilai tidak efektif.

Kata Kunci: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

ABSTRACT

Value for Money Analysis in the Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP) of Riau Province's Regional Development Planning Agency is the title of this study. The program was discovered to be not running and had not reached the objective in Bappeda's LAKIP. As a result, it was important to assess the program's economic, efficient, and effective performance. The goal of this study is to use the notion of value for money to assess the performance of Bappeda Riau Province.

Quantitative research is the name for this type of study. The data used is from the Riau Province Bappeda's Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) for 2018 and 2019. Interviews and documentation are used to gather information. Quantitative analysis employing the value for money method, which includes economic, efficiency, and effectiveness assessments, was utilized to analyze the data

The results of the first study, which looked at the level of economic ratios in 2018 and 2019, revealed that the average economic ratio was $<100\%$, indicating that the Bappeda of Riau Province's program was regarded cost-effective. Second, the average efficiency ratio in 2018 is $>100\%$, indicating that the program conducted by the Bappeda of Riau Province is efficient. Meanwhile, in 2019, the average efficiency ratio was $<100\%$, indicating that the program conducted by the Riau Province Bappeda was ineffective. Third, the effectiveness ratio level in 2018 and 2019 shows that the average effectiveness ratio is $<100\%$, indicating that the performance indicators established by the Bappeda of Riau Province are ineffectual.

Keywords: *Economic, Efficiency, Effectiveness*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabil'alamin dengan mengucapkan puji syukur penulis kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan di Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan, dukungan, bantuan, arahan, serta kerjasama dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
3. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan 1
4. Dr.Hj Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 2
5. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Wakil Dekan 3

6. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Program Studi Akuntansi
7. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
8. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi
9. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi
10. Orang tua dan keluarga yang terus memberikan dukungan, doa, bimbingan, serta kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
11. Teman-teman yang mendukung penuh agar penulis dapat selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari mungkin masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 November 2021

Penulis

Muhammad Taufik Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 <i>Good Governance</i> (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik).....	13
2.1.1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	13
2.1.1.2 Karakteristik <i>Good Governance</i>	14
2.1.2 Kinerja	15
2.1.2.1 Konsep Kinerja	15
2.1.2.2 Pengukuran Kinerja	15
2.1.2.3 Indikator Kinerja.....	17
2.1.2.4 Evaluasi Kinerja	19
2.1.3 <i>Value For Money</i>	21
2.1.3.1 Konsep <i>Value For Money</i>	21
2.1.3.2 Pengukuran <i>Value For Money</i>	22
2.1.3.3 Langkah-Langkah Pengukuran <i>Value For Money</i>	23
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Definisi Variabel Penelitian	31
3.4 Populasi dan Sampel.....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.....	36
4.2 Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Hasil Pengukuran Ekonomi.....	45
4.2.2 Hasil Pengukuran Efisiensi.....	48

4.2.3 Hasil Pengukuran Efektivitas	51
4.3 Pembahasan	57
4.3.1 Analisis Pengukuran Ekonomi.....	57
4.3.2 Analisis Pengukuran Efisiensi.....	59
4.3.3 Analisis Pengukuran Efektivitas	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018-2019.....	5
Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018.....	6
Tabel 1.3 Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019.....	7
Tabel 1.4 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 dan 2019.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 ASN Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2018)	43
Tabel 4.2 ASN Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2019)	43
Tabel 4.3 Kondisi ASN Menurut Jabatan (Per Desember 2018).....	43
Tabel 4.4 Kondisi ASN Menurut Jabatan (Per Desember 2019)	44
Tabel 4.5 ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan (Per Desember 2018).....	44
Tabel 4.6 ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan (Per Desember 2019).....	44
Tabel 4.7 Kondisi ASN Menurut Pendidikan Struktural (Per Desember 2018)...	45
Tabel 4.8 Kondisi ASN Menurut Pendidikan Struktural (Per Desember 2019)...	45
Tabel 4.9 Pengukuran Ekonomi Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018.....	46
Tabel 4.10 Pengukuran Ekonomi Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019.....	47
Tabel 4.11 Pengukuran Efisiensi Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018	49
Tabel 4.12 Pengukuran Efisiensi Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019	50
Tabel 4.13 Pengukuran Efektivitas Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018	51
Tabel 4.14 Pengukuran Efektivitas Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019	54
Tabel 4.15 Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018-2019	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengukuran <i>value for money</i>	23
Gambar 2.2 Elemen-elemen pengukuran kinerja <i>value for money</i>	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Riau.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 2 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 3 Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018
- Lampiran 4 Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019
- Lampiran 5 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 6 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018
- Lampiran 7 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019
- Lampiran 8 Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem manajemen pemerintah daerah berbasis akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem manajemen yang efektif diartikan mampu mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang direncanakan. Semakin tinggi rasio (angka perbandingan) tersebut berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Sistem manajemen yang efisien berarti segala kegiatan yang menggunakan berbagai *input* yang menghasilkan *output* dengan biaya produksi terendah, atau dikatakan tidak terjadi pemborosan (keborosan). Manajemen yang efektif dan efisien dikatakan sebagai manajemen berkinerja tinggi.

Sistem manajemen pemerintah daerah berbasis transparansi berarti semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan, diketahui secara luas oleh masyarakat/rakyat. Jelaslah, bahwa dalam manajemen pemerintah daerah yang baik harus berbasis kinerja. Dalam otonomi daerah, manajemen pemerintah daerah selain berbasis kinerja, harus pula

berbasis transparansi dan akuntabilitas. Jadi manajemen pemerintah daerah harus berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

Sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* (Adisasmita, 2011:23). Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila organisasi sektor publik memperhatikan, menilai atau mengukur kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja ini dilakukan oleh semua organisasi dan sebenarnya semua individu melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah metode untuk menilai kemajuan yang dicapai oleh organisasi dibandingkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Di dalam organisasi publik sering kali ditemui tidak melakukan pengukuran kinerja atau bahkan pengukuran kinerja yang dilakukan ini masih belum bagus. Berbeda dengan organisasi *private* yang pengukuran kinerjanya sudah sangat maju.

Dalam pengukuran kinerja dikenal dengan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah nilai yang dapat diukur yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan menakar kemajuan terhadap target-target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini ada beberapa macam yaitu, (1) *Input* atau masukan merupakan indikator yang diperlukan supaya implementasi kegiatan bisa melahirkan *output* yang ditetapkan seperti biaya, sumber daya manusia dan lain

sebagainya. (2) *Output* atau keluaran merupakan objek yang dikehendaki bisa langsung didapatkan dari aktivitas fisik ataupun non fisik. (3) *Outcome* atau hasil merupakan semua objek sesuatu yang menggambarkan kemanfaatan *output* kegiatan dalam waktu menengah atau efek secara langsung. (4) *Benefit* atau manfaat merupakan objek yang berhubungan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan paling akhir.

Oleh karena itu, prinsip kinerja yang baik yaitu dengan memperhatikan konsep *value for money* (3E). *Value for money* digunakan untuk mengukur kinerja atas program dan kegiatan. Konsep *Value for money* dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

Pengukuran ekonomi adalah suatu kegiatan operasional dinilai ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran efisiensi adalah proses kegiatan operasional dapat dinilai efisien apabila hasil kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efektivitas adalah kegiatan operasional dinilai efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Maka dari itu, perlu dilakukannya pengukuran kinerja menggunakan metode *value for money* terhadap program-program yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau agar masyarakat mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau sudah ekonomis, efisien dan efektivitas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan suatu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan daerah. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yang disampaikan kepada Gubernur Riau.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran strategis dan realisasi anggaran yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan laporan kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau mewujudkan *Good Governance*. Berikut ini

diketahui Laporan kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018-2019

Kegiatan	2018		Capaian (%)	2019		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Program Pengembangan Data / Informasi	1.705.742.500,00	925.520.539,00	54,26	1.285.247.800	1.152.106.300	89,64
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.507.402.900,00	4.413.212.825,00	33,70	7.764.447.150	7.104.873.450	89,64
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	53.000.000,00	51.706.225,00	97,56	70.900.000	70.211.275	99,03
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2.463.000.000,00	1.535.797.791,00	62,35	3.030.000.000	2.647.788.821	87,39
Jumlah	11.729.145.400,00	6.926.237.380,00	59,05	12.150.594.950	10.947.979.846	90,10

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Pada tahun 2018, di tabel 1.1 terdapat realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menetapkan target sebesar 87%. Program yang belum mencapai target yaitu sebagai berikut: (1) Program pengembangan data/informasi belum mencapai target yaitu capaiannya sebesar 54,26%. (2) Program perencanaan pembangunan daerah belum mencapai target yaitu capaiannya sebesar 33,70%. Dan (3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan juga belum mencapai target yaitu capaiannya sebesar 62,35%.

Pada tahun 2019, di tabel 1.1 terdapat capaian realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi

Riau menetapkan target sebesar 90%. Program yang belum mencapai target yaitu sebagai berikut: (1) Program pengembangan data / informasi belum mencapai target yaitu capaiannya sebesar 89,64%, (2) Program perencanaan pembangunan daerah belum mencapai target yaitu capaiannya sebesar 89,64%, (3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan 87,39%. Setiap program yang belum mencapai target tersebut mengakibatkan masyarakat tidak sepenuhnya merasakan dampaknya dari program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Anggaran ini sebenarnya harus direalisasikan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Agar anggaran yang direalisasikan, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari anggaran tersebut.

Tabel 1.2
Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Keselerasan Perencanaan Pembangunan	- Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	87%	100%	114,94%
		- Persentase keselarasan PPAS terhadap RKPD	87%	-	-
		- Persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD	87%	98,58%	113,31%
		- Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD	87%	96,33%	110,72%
2.	Sinergitas Perencanaan Pembangunan	- Persentase tingkat sinergitas pusat dan provinsi	87%	80%	91,9%
		- Persentase tingkat sinergitas provinsi dan kab/kota	87%	90,74%	104,3%
3.	Pembangunan Yang Akuntabel	- Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap Tata Ruang	87%	-	-
		- Persentase kesesuaian program RKPD terhadap kebutuhan masyarakat	87%	29,50%	33,90%

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018

Pada tahun 2018, di tabel 1.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menetapkan target sebesar 87%. Realisasi indikator kinerja yang belum mencapai target dan tidak terealisasi yaitu sebagai berikut: (1) Realisasi indikator kinerja persentase tingkat sinergitas pusat dan provinsi sebesar 80% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 87%. (2) Realisasi

indikator kinerja persentase kesesuaian program RKPD terhadap kebutuhan masyarakat sebesar 29,50% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 87%. (3) Indikator kinerja persentase keselarasan PPAS terhadap RKPD tidak terealisasi. (4) Indikator kinerja persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang tidak terealisasi.

Capaian indikator kinerja yang belum mencapai target dan tidak terlaksana yaitu sebagai berikut: (1) Persentase kesesuaian program RKPD terhadap kebutuhan masyarakat sebesar 33,90% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 87%. (2) Capaian indikator kinerja persentase keselarasan PPAS terhadap RKPD tidak terlaksana. (3) Capaian indikator kinerja persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang tidak terlaksana.

Tabel 1.3
Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Keselaran Perencanaan Pembangunan	- Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	90%	99%	110%
		- Persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD	90%	98,40%	109,33%
		- Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD	90%	88,82%	98,68%
2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan	- Persentase Prioritas Provinsi yang sinergis dengan prioritas pusat	90%	80%	88,88%
		- Persentase prioritas kab/kota yang sinergis dengan prioritas provinsi	90%	77,47%	88,07%
3	Pembangunan Yang Akuntabel	- Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap Tata Ruang	90%	29,66%	32,95%
		- Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi kewenangan Provinsi	90%	84,82%	94,24%

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2019

Pada tahun 2019, di tabel 1.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menetapkan target sebesar 90%. Realisasi indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu sebagai berikut: (1) Realisasi indikator kinerja Persentase keselarasan renja OPD terhadap renstra OPD sebesar 88,82%

atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. (2) Realisasi indikator kinerja persentase prioritas Provinsi yang sinergis dengan prioritas pusat sebesar 80% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. (3) Realisasi indikator kinerja persentase prioritas kab/kota yang sinergis dengan prioritas provinsi sebesar 77,47% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. (4) Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang sebesar 29,66% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. (5) Realisasi indikator kinerja persentase usulan musrenbang yang menjadi kewenangan Provinsi sebesar 84,82% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%.

Capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu sebagai berikut:

(1) Persentase prioritas Provinsi yang sinergis dengan prioritas pusat sebesar 88,88% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. (2) Persentase prioritas kab/kota yang sinergis dengan prioritas provinsi sebesar 88,07% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. (3) Persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang sebesar 32,95% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%.

Tabel 1.4
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	50.220.692.568,00	41.289.653.030,00	82,22
2	2019	51.570.306.396,00	47.298.638.824,00	91,72

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019

Realisasi penyerapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 82,22% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan ke 3 dan ke 4. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan ke 3 dan ke 4 karena terjadinya defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran atau pengurangan anggaran sehingga anggaran yang diasumsikan tidak mencukupi di Triwulan ke 3 dan ke 4. Oleh karena itu kegiatan tersebut tidak terlaksana. Setiap kegiatan yang tidak terlaksana tersebut mengakibatkan masyarakat tidak bisa merasakan dampaknya dari kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis mencoba menerapkan konsep *value for money* dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- b. Bagi Instansi, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau tentang menilai kinerja menggunakan *value for money*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat mengetahui konsep *value for money* sebagai penilaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- b. Bagi Instansi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai konsep *value for money* sebagai penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai bahan kajian dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian kinerja menggunakan konsep *value for money*.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan dari hasil penelitian ini merupakan suatu skripsi yang terdiri atas tiga bab, yang disertai daftar pustaka sebagai acuan teori yang digunakan oleh penulis.

Untuk mempermudah dalam membaca penelitian ini, maka secara garis besar gambaran umum penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam bagian isi skripsi. Bab ini terdiri dari beberapa subbab diantaranya: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Telaah pustaka berisi kajian tentang pengertian dan karakteristik *Good Governance*, konsep kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, evaluasi kinerja, konsep *value for money*, pengukuran *value for money*, langkah-langkah pengukuran *value for money*, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Dalam bagian ini dilakukan kajian mengenai konsep/teori berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku serta jurnal ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, definisi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa subbab diantaranya: Gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, hasil penelitian, dan pembahasan.

Gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau meliputi *profile* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yakni tentang hasil perhitungan rasio ekonomi, hasil perhitungan rasio efisiensi, hasil perhitungan rasio efektivitas, analisis rasio ekonomi, analisis rasio efisiensi, dan analisis rasio efektivitas.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari beberapa subbab diantaranya: Simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang jawaban permasalahan penelitian dan saran berisi tentang solusi untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

2.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Adisasmita (2011:23) *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut.

Makna *good* dalam *Good Governance* memiliki dua penafsiran. Awal, nilai yang menjunjung besar kemauan, serta nilai yang bisa meningkatkan keahlian rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan serta keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien serta efektif dalam penerapan tugasnya buat menggapai tujuan tersebut. *Good Governance* berorientasi pada ialah, (1) orientasi sempurna negeri yang ditunjukan pada pencapaian tujuan nasional, (2) pemerintahan yang berperan secara sempurna, ialah secara efisien serta efektif dalam melaksanakan upaya menggapai tujuan nasional.

Pengertian lain menurut Mulyadi (2018:137) “*Good Governance* merupakan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola berbagai usaha negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Menurut Safroni (2012:80) konsep *Good Governance* dapat dijelaskan pula sebagai berikut.

- 1) Sebagai pengelolaan atau kepengarahan negara yang baik.
- 2) Pelaksananya disebut *government*.
- 3) *Government* identik dengan pengelola, atau pengurus negara.
- 4) Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan efisien.

- 5) Bagaimana penyelenggaraan negara ditata dan bagaimana tatanan itu berproses. Disamping itu, dengan adanya media tersebut, maka seluruh kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam menengahi keberagaman pikiran atau konflik yang ada. Situasi seperti ini akan menciptakan peluang potensial bagi masyarakat luas untuk menjalankan kewajiban maupun haknya secara legal dan bertanggungjawab.

Menurut Mardiasmo (2018:23) mengatakan bahwa mengenai *Good Governance* adalah sebagai berikut.

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif., menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.1.1.2 Karakteristik *Good Governance*

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi (Mardiasmo, 2018:23):

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficiency, dan effectiveness)*.

2.1.2 Kinerja

2.1.2.1 Konsep Kinerja

Menurut Sujarweni (2020:107) “Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Menurut Fahmi (2017:2) kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

2.1.2.2 Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo dalam Sujarweni (2020:107) mengatakan bahwa pengukuran kinerja di definisikan sebagai berikut:

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian

suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Menurut Adisasmita (2011:91) mengatakan bahwa pengukuran kinerja di definisikan sebagai berikut:

Pengukuran kinerja ialah penghubung antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Sesuatu lembaga pemerintah bisa dikatakan sukses melakukan tugasnya, bila ada fakta kalau penanda ataupun dimensi capaian target terlaksana cocok ataupun searah dengan misi yang sudah diformulasikan. Tanpa terdapatnya pengukuran kinerja sangat susah dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi lembaga. Kebalikannya dengan disusunnya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional bisa diukur, hingga bisa diharapkan pembenaran yang logis serta argumentasi yang pas buat berkata kalau sesuatu penerapan program lembaga tersebut sukses ataupun tidak.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain (Sujarweni, 2020:107):

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka perusahaan akan mendapat manfaat langsung yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam Sujarweni (2020:108):

1. Memberikan pemahaman tentang dimensi yang digunakan buat memperhitungkan kinerja.
2. Membagikan arah buat menggapai sasaran kinerja yang diresmikan.
3. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja serta membandingkannya dengan sasaran kinerja dan melaksanakan aksi koreksi buat membetulkan kinerja.

4. Selaku dasar buat membagikan penghargaan serta hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur cocok dengan sistem pengukuran kinerja yang sudah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan serta pimpinan dalam rangka membetulkan kinerja organisasi.
6. Menolong mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Menolong menguasai proses aktivitas lembaga pemerintah.
8. Membenarkan kalau pengambilan keputusan dicoba secara objektif.

Dalam hubungan pengukuran kinerja, beberapa hal penting perlu mendapat penekanan, yaitu (Adisasmita, 2011:92):

1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok bagi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) serta dampak (impact), dan indikator proses bila diperlukan buat menampilkan proses manajemen aktivitas yang sudah terjalin.
2. Penetapan Capaian Kinerja
Penetapan capaian kinerja dimaksudkan buat mengenali serta memperhitungkan capaian indikator kinerja dari penerapan aktivitas/ program serta kebijakan yang sudah diresmikan oleh sesuatu lembaga pemerintah.
3. Formulir Pengukuran Kinerja
Untuk memudahkan melakukan evaluasi atas kesesuaian dan keselarasan antara kegiatan dan program, atau antara program penunjang dengan program utama atau antara program yang lebih rendah dengan program yang lebih tinggi, atau antara kebijakan instansi yang lebih rendah dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi, dapat digunakan formulir PK (Pengukuran Kinerja).

2.1.2.3 Indikator Kinerja

Menurut Adisasmita (2011:102) dalam manajemen, indikator kinerja mempunyai peranan antara lain:

1. Selaku perlengkapan ukur yang digunakan buat pencapaian kinerja.
2. Selaku fasilitas buat memantau sepanjang mana upaya yang sudah dicoba mendekati pencapaian kinerja yang sudah direncanakan.
3. Selaku fasilitas buat mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkannya dengan kinerja yang sudah diresmikan tadinya.
4. Selaku perlengkapan buat membagikan penghargaan maupun hukuman yang objektif untuk para pelaksananya.
5. Selaku perlengkapan komunikasi antara bawahan serta pimpinan dalam rangka membetulkan kinerja organisasi.
6. Jadi perlengkapan buat membetulkan mutu pelayanan kepada warga.

7. Jadi perlengkapan buat menolong menguasai proses aktivitas lembaga pemerintahan.
8. Jadi perlengkapan buat membenarkan pengambilan keputusan dicoba secara objektif..

Menurut Ulum (2012:24) mengatakan bahwa “Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya”.

Secara umum indikator mempunyai fungsi, antara lain (Adisasmita, 2011:103):

- 1) Memperjelas tentang apa yang hendak dihasilkan serta kapan hasil tersebut hendak dicapai dari sesuatu kegiatan.
- 2) Menghasilkan konsensus bermacam pihak yang berkepentingan buat menjauhi kesalahan interpretasi penerapan kebijaksanaan/ program/ aktivitas.
- 3) Jadi dasar untuk pengukuran, analisis serta penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah.

Menurut Adisasmita (2011:103) sebelum merumuskan indikator kinerja hendaknya diketahui beberapa syarat indikator kinerja, yaitu:

1. Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif.
3. Relevan dengan aspek-aspek kegiatan.
4. Dapat dicapai (realistis, penting, dan berguna).
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian.
6. Efektif.

2.1.2.4 Evaluasi Kinerja

Setelah tahap pengukuran kinerja dilalui, maka berikutnya adalah tahap evaluasi kinerja. Tahapan evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan. Menurut Abidin (2006:213) informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan:

1. Efisiensi (*efficiency*)
2. Keuntungan (*profitability*)
3. Efektif (*effectiveness*)
4. Keadilan (*equity*)
5. *Detriments*
6. Manfaat tambahan (*marginal rate of return*)

Menurut Adisasmita (2011:93) beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan evaluasi kinerja adalah membuat kesimpulan hasil evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja.

1. Membuat Kesimpulan Hasil Evaluasi

Buat membuat kesimpulan hasil penilaian kinerja tersebut di atas digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja diartikan terbuat bersumber pada pertimbangan tiap- tiap lembaga antara lain dengan skala pengukuran ordinal, misalnya.

85 s/d 100 = baik	Sangat baik	Sangat berhasil
70 s/d 85 = sedang	Baik	Berhasil
55 s/d 70 = kurang	Sedang	Cukup berhasil
Kurang 55 = sangat kurang	Kurang baik	Tidak berhasil

2. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja

Sesuatu laporan akuntabilitas kinerja tidak cuma berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh penilaian indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran serta evaluasi kinerja, sebagaimana dijabarkan di atas. Namun pula wajib menyajikan informasi serta data relevan yang lain untuk pembuat keputusan supaya bisa menginterpretasikan keberhasilan/

kegagalan tersebut secara lebih luas serta mendalam. Oleh sebab itu, dari kesimpulan penilaian butuh terbuat sesuatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja lembaga secara totalitas. Analisis tersebut meliputi penjelasan tentang keterkaitan pencapaian kinerja aktivitas serta program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan target, tujuan, serta misi dan visi sebagaimana diresmikan dalam perencanaan strategik.

Dalam akuntabilitas kinerja, sesuai dengan substansinya, maka suatu akuntabilitas akan mencerminkan akuntabilitas kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dalam pokok pembahasan selanjutnya, evaluasi yang akan dikemukakan meliputi Evaluasi Kinerja Kegiatan, Evaluasi Kinerja Program dan Evaluasi Kinerja Kebijakan.

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Menurut Nawawi (2009:171) “Evaluasi menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perencanaan strategis”.

2. Evaluasi Kinerja Program

Menurut Nawawi (2009:174) “Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Evaluasi kinerja program dilakukan dengan cara mengambil hasil dari setiap nilai capaian kinerja kegiatan, dan kemudian memberikan pembobotannya, untuk kemudian dapat diperoleh nilai capaian program”.

3. Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan

Menurut Nawawi (2009:177) “Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan merupakan penilaian yang kritis mengenai suatu kebijakan. Oleh karena itu evaluasi

kebijakan yang bermutu sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya”.

2.1.3 Value For Money

2.1.3.1 Konsep Value For Money

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2018:5) mengatakan bahwa "*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas”.

Menurut Ulum (2012:24) mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, mempunyai arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) mempunyai arti mencapai tujuan dan sasaran.

Buat menunjang dilakukannya pengelolaan dana publik(*public money*) yang berdasarkan konsep *value for money*, hingga dibutuhkan Sistem Pengelolaan Keuangan Wilayah serta Anggaran Wilayah yang baik. Perihal tersebut bisa tercapai apabila pemerintah wilayah mempunyai sistem akuntansi yang baik.

2.1.3.2 Pengukuran *Value For Money*

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Menurut Ulum (2012:24) indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan
- 2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E. (Ulum, 2012:25)

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Suatu kegiatan operasional dinilai ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Ekonomi diukur melalui rasio antara *input* aktual dengan *input* rencana. Indikator ekonomi yaitu kualitas dan kuantitas.

2. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dinilai efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisiensi dari proses internal).

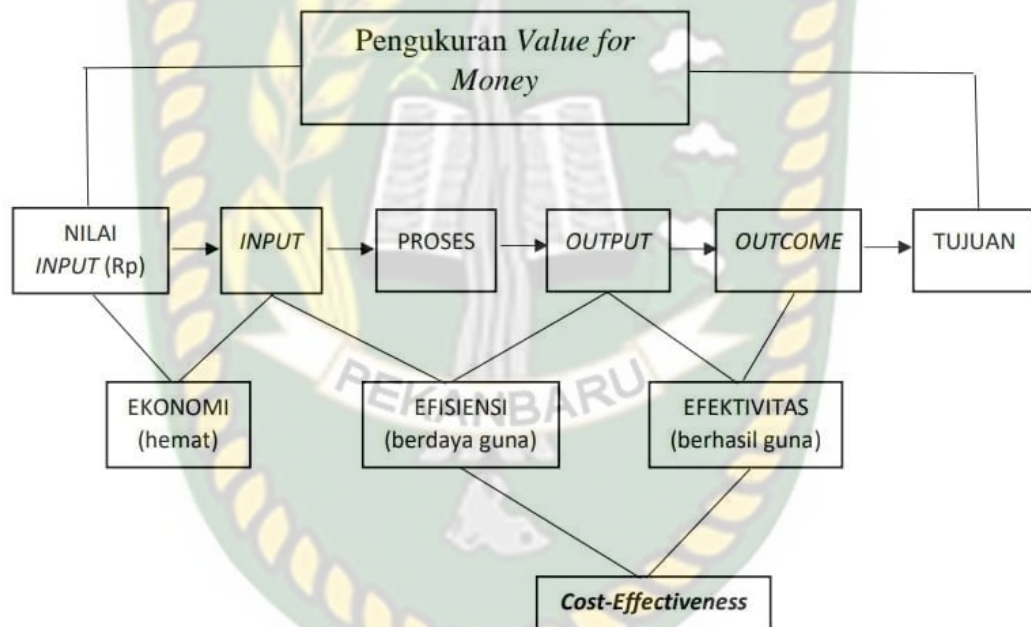
3. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dinilai efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas

diukur dengan rasio antara *outcome* dengan *output*. Indikator efektivitas yaitu kebijakan dan prosedur.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Pengukuran *value for money*



Sumber: Mardiasmo dalam Ulum (2012:26)

2.1.3.3 Langkah-Langkah *Pengukuran Value For Money*

Langkah-langkah pengukuran *value for money* sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi

Menurut Ulum (2012:27) Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut.

1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?

2) Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

3) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Berikut rumus pengukuran ekonomi:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi dalam Gabriela Thalia Wuwungan, dkk (2017)

Keterangan:

Input: Realisasi anggaran

Harga *Input*: Anggaran

Kriteria pengukuran ekonomi adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis

2. Pengukuran Efisiensi

Menurut Ulum (2012;27) Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *input* dengan *output*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Berikut ini rumus pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo dalam Gabriela Thalia Wuwungan, dkk (2017)

Keterangan:

Output: Hasil yang dicapai

Input: Realisasi anggaran

Kriteria pengukuran efisiensi adalah:

1. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisien berimbang
3. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efisien

Rasio efisiensi tidak hanya dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibanding unit B, unit A lebih efisien tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara berikut (Ulum, 2012:27):

1. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama.
2. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*.
3. Menurunkan *input* pada Tingkat *Output* yang sama.
4. Meningkatkan *input* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan *output*.

Menurut Ulum (2012:28) dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut

1) Efisiensi alokasi (efisiensi 1)

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal.

2) Efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2).

Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Ulum (2012;27) pengukuran efektivitas dapat didefinisikan adalah sebagai berikut.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut rumus pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: Dwi Purwiyanti (2017)

Keterangan:

Outcome: Tujuan atau target yang hendak dicapai

Output: Hasil yang dicapai

Kriteria pengukuran efektivitas adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif

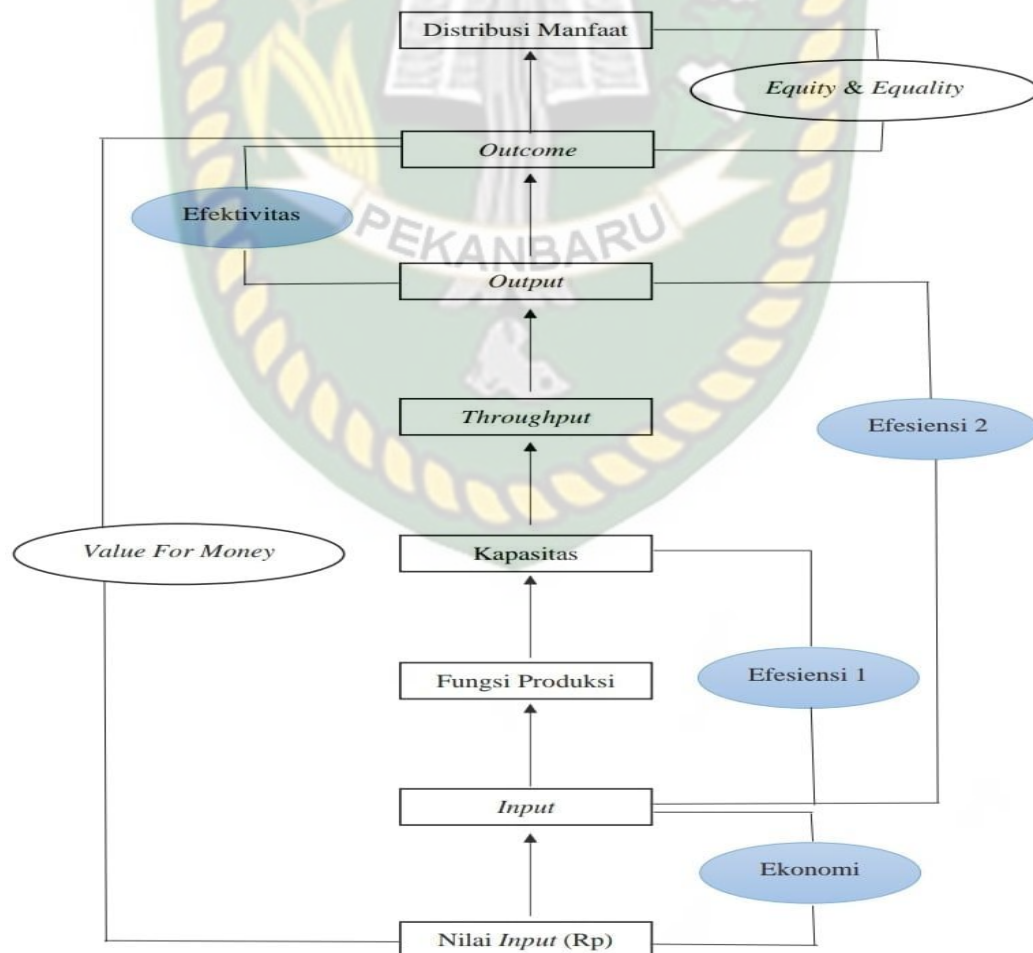
4. Pengukuran *Outcome*

Menurut Smith dalam Ulum (2012:28) “*Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan”.

Menurut Ulum (2012:28) Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu sebagai berikut.

Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran *outcome* digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu dilaksanakan dan metode mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Gambar 2.2 Elemen-elemen pengukuran kinerja *value for money*



Sumber: Mardiasmo dalam Ulum (2012:29)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Tri Astuti Afiati (2011)	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang	Deskriptif kuantitatif	Rasio Ekonomi Bappeda Kabupaten Semarang Kurang baik, Rasio Efisiensi sangat baik, dan Rasio Efektivitas baik.
2	Dwi Purwiyanti (2017)	Analisis Kinerja Berbasis Konsep <i>Value For Money</i> Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	Analisis deskriptif	Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan pekerjaan secara ekonomis, secara efisien dan dengan efektif.
3	Gabriela Thalia Wuwungan, Jantje Tinangon, Sintje Rondunuwu (2019)	Penerapan Metode <i>Value For Money</i> Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado	Deskriptif kuantitatif	Penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Manado di tahun 2018 sudah ekonomis, sudah efisien, tetapi belum efektif.
4	Indrayani dan Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)	Deskriptif Kualitatif	1.Rasio ekonomis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe bahwa bernilai ekonomis. 2.Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kota

				Lhokseumawe cukup baik. 3.Rasio efektifitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa tahun tersebut dinilai tidak efektif.
5	A.B Setiawan dan W.Gusnita (2016)	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor	Analisis Deskriptif	1.Hasil perhitungan LAKIP pada tahun 2010 dengan menggunakan metode VFM dikatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitnak Caiwi Bogor dengan sangat ekonomi, sangat efisien, dan sangat efektif.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada (Pandoyo dan Sofyan, 2018:67).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau belum sesuai dengan Prinsip *Value For Money*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian (*research design*) adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan peneliti dari studi (Sekaran dan Bougie, 2017:109). Desain penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:12).

Penggunaan metode penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dengan menggunakan konsep *value for money*. Dalam pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money* terdapat rumus-rumus yang telah ditentukan dan disesuaikan yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yang terletak di Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Saya memilih lokasi ini

sebagai objek penelitian saya karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk melaporkan pengukuran kinerja dan terdapat masalah tentang program yang belum mencapai target serta program yang tidak terlaksana.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

1. *Value For Money*

Value for money merupakan pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Konsep *Value for money* dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

1) Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Suatu kegiatan operasional dinilai ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Ekonomi diukur melalui rasio antara *input* aktual dengan *input* rencana. Indikator ekonomi yaitu kualitas dan kuantitas. Berikut ini rumus pengukuran ekonomi:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi dalam Gabriela Thalia Wuwungan, dkk (2017)

Keterangan:

Input: Realisasi anggaran

Harga *Input*: Anggaran

Kriteria pengukuran ekonomi adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis
 2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis seimbang
 3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis
- 2) Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dinilai efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Indikator efisiensi yaitu *input* (masukan) dan *output* (keluaran). Berikut ini rumus pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo dalam Gabriela Thalia Wuwungan, dkk (2017)

Keterangan:

Output: Hasil yang dicapai

Input: Realisasi anggaran

Kriteria pengukuran efisiensi adalah:

1. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efisien
 2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisien seimbang
 3. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efisien
- 3) Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dinilai efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas diukur dengan rasio antara *outcome* dengan *output*. Indikator efektivitas yaitu kebijakan dan prosedur. Berikut rumus pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: Dwi Purwiyanti (2017)

Keterangan:

Outcome: Tujuan atau target yang hendak dicapai

Output: Hasil yang dicapai

Kriteria pengukuran efektivitas adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif

2. LAKIP

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibentuk untuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:167). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Evaluasi Renja, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mencakup beberapa anggota pilihan dari populasi tersebut (Gumanti, dkk, 2018:176). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu diperoleh langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau seperti gambaran umum dan struktur organisasi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data atau pihak-pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 dan 2019.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum dan pelaksanaan program kinerja.
2. Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan cara menghitung kinerja menggunakan metode *Value For Money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Riau

4.1.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Riau

1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga), maupun Provinsi dan Kabupaten Kota (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat diimplementasikan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, Visi dan Misi Perubahan RPJMD 2014-2019. Berdasarkan hasil dari perumusan visi (perumusan terlampir), maka dapat dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Riau yaitu : Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas

2. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi (perumusan terlampir), dapat dituangkan melalui 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Perencana serta Kapasitas Kelembagaan Menuju Lembaga Perencana Yang Profesional
3. Peningkatan Pengelolaan Data Perencanaan yang Valid serta dapat Dipertanggung Jawabkan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi. Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Kenaikan Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kenaikan Mutu serta Kapasitas Kelembagaan serta Aparatur Perencana

3. Tingkatkan Sistem Pengelolaan Informasi, Statistik serta Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Buat tercapainya tujuan yang sudah dijabarkan di atas, hingga target bisa dilihat pada berikut ini:

1. Meningkatnya mutu perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan
2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana
3. Tersedianya informasi yang lengkap selaku dasar analisis perencanaan pembangunan

4.1.3 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Kenaikan mutu koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Penguatan metodologi formulasi kebijakan serta inovasi teknologi
3. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan wilayah lewat penataan sistem perencanaan
4. Tingkatkan kompetensi aparatur perencana
5. Kenaikan capacity building SDM perencana
6. Pengembangan sistem serta mutu informasi serta data perencanaan pembangunan daerah
7. Meningkatkan sistem data perencanaan, tata ruang berbasis website GIS, e-planning serta e- monev

Kebijakan Tubuh Perencanaan Pembangunan Wilayah(Bappeda) Provinsi Riau selaku berikut:

1. Kenaikan mutu penerapan konsultasi publik serta Musrenbang daerah
2. Tingkatkan mutu pengendalian serta penilaian terhadap penerapan rencana pembangunan
3. Pembelajaran serta pelatihan kompetensi
4. Kenaikan stratifikasi Pembelajaran aparatur dalam serta luar negeri
5. Penerapan reformasi birokrasi secara tidak berubah- ubah serta berkepanjangan dalam rangka kenaikan kinerja(better performance) lembaga serta aparatur.
6. Pengembangan infratraktur Teknologi Data Tekstual serta Spasial berbasis elektronik.
7. Tingkatkan mutu fasilitas serta prasarana dan pengelolaannya dalam rangka menunjang kenaikan kinerja lembaga serta pegawai.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penataan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian serta Penilaian Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bidang Pemerintahan serta

Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian serta Sumber Energi Alam serta Bidang Infrastruktur serta Kewilayahan;

2. Penerapan tugas sokongan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian serta Penilaian Pembangunan Wilayah, Bidang Pemerintahan serta Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian serta Sumber Energi Alam serta Bidang Infrastruktur serta Kewilayahan;
3. Pemantauan, penilaian, serta pelaporan penerapan tugas sokongan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian serta Penilaian Pembangunan Wilayah, Bidang Pemerintahan serta Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian serta Sumber Energi Alam serta Bidang Infrastruktur serta Kewilayahan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan guna penunjang Urusan Pemerintahan Wilayah pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian serta Penilaian Pembangunan Wilayah, Bidang Pemerintahan serta Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian serta Sumber Energi Alam serta Bidang Infrastruktur serta Kewilayahan
5. Penerapan guna lain yang diberikan oleh Gubernur terpaut dengan tugas serta gunanya.

4.1.5 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2017 kedepan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Provinsi Riau membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut:

- 1) **Kepala**, memiliki tugas menolong Gubernur melakukan guna penunjang Urusan Pemerintahan yang jadi kewenangan Wilayah pada bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah.
- 2) **Sekretariat**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta penilaian pada Subbidang Perencanaan Makro, Subbidang Perencanaan Pembangunan, serta Subbidang Pengendalian serta Penilaian.
- 4) **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta penilaian pada Subbidang Pemerintahan serta Pemberdayaan Warga, Subbidang Pembelajaran, Budaya, Pemuda serta Ketenagakerjaan, serta Subbidang Kesehatan serta Keluarga Berencana.
- 5) **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta penilaian pada Subbidang Perdagangan Industri, Koperasi, Penanaman Modal serta Keuangan, Subbidang Area Hidup, Kehutanan, Pariwisata serta Sumber Energi Mineral, serta Subbidang Pertanian, Kelautan serta Perikanan.

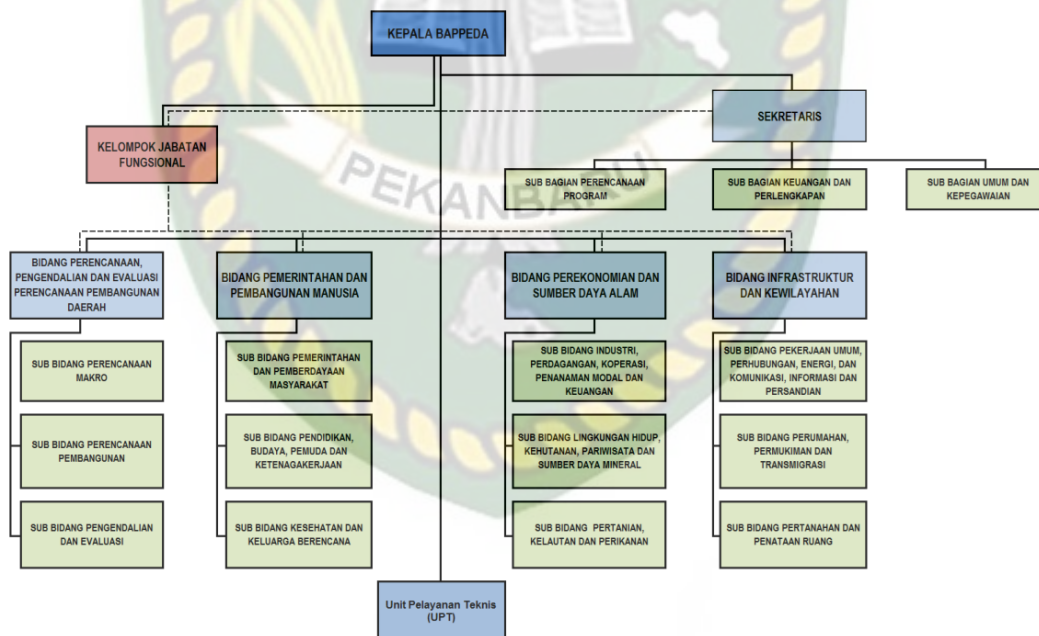
6) **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta penilaian pada Subbidang Pekerjaan Universal, Perhubungan, Tenaga, serta Komunikasi serta Data, Subbidang Perumahan, Permukiman serta Transmigrasi, serta Subbidang Pertanahan serta Penyusunan Ruang.

7) **Kelompok Jabatan Fungsional**

8) **Unit Pelayanan Teknis (UPT).**

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau sesuai dengan peraturan yang terbaru adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Riau



Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau

4.1.6 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, didukung dengan 156 orang

Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018 dan 168 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1
ASN Bappeda Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
(Per Desember 2018)

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	Gol. IV	3	19.
2	Gol. III	10	67.
3	Gol. II	1	12.
4	Gol. I	2	1.
JUMLAH		156	100,00

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel 4.2
ASN Bappeda Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
(Per Desember 2019)

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	Gol. IV	3	22.
2	Gol. III	11	65.
3	Gol. II	1	11.
4	Gol. I	2	1.
JUMLAH		168	100,00

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4.3
Kondisi ASN Bappeda Provinsi Riau Menurut Jabatan
(Per Desember 2018)

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0,64
2	Eselon III	4	2,56
3	Eselon IV	15	9,61
4	Fungsional Tertentu	28	17,94
5	Staf/Non Struktural	108	69,23
JUMLAH		156	100,00

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel 4.4
Kondisi ASN Bappeda Provinsi Riau Menurut Jabatan
(Per Desember 2019)

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	-	-
2	Eselon III	2	1,19
3	Eselon IV	13	7,74
4	Fungsional Tertentu	35	20,83
5	Staf/Non Struktural	118	70,24
JUMLAH		168	100,00

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4.5
ASN Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Per Desember 2018)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Sarjana Strata III (S.3)	2	1,22
2	Sarjana Strata II (S.2)	4	28,84
3	Sarjana Strata I (S.1)	7	49,35
4	Diploma	7	4,48
5	SLTA Sederajat	2	14,74
6	SLTP Sederajat	-	0,00
7	SD Sederajat	2	1,28
JUMLAH		15	100,00

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel 4.6
ASN Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Per Desember 2019)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Sarjana Strata III (S.3)	2	1,19
2	Sarjana Strata II (S.2)	5	32,74
3	Sarjana Strata I (S.1)	7	47,02
4	Diploma	7	4,17
5	SLTA Sederajat	2	13,69
6	SLTP Sederajat	-	0,00
7	SD Sederajat	2	1,19
JUMLAH		16	100,00

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4.7
Kondisi ASN Bappeda Provinsi Riau Menurut Pendidikan Struktural
(Per Desember 2018)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklatpim IV	18
2.	Diklatpim III	16
3.	Diklatpim II	7
4.	Diklatpim I	-
JUMLAH		41

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel 4.8
Kondisi ASN Bappeda Provinsi Riau Menurut Pendidikan Struktural
(Per Desember 2019)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklatpim IV	19
2.	Diklatpim III	14
3.	Diklatpim II	6
4.	Diklatpim I	-
JUMLAH		39

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan pemaparan hasil dari pengolahan data sesuai dengan cara mengukur atau menilai kinerja menggunakan metode *value for money* yaitu pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, pengukuran efektivitas.

4.2.1 Hasil Pengukuran Ekonomi

Pada pengukuran ekonomi dapat diukur dengan perbandingan nilai realisasi (*input*) antara nilai anggaran (*harga input*). Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dapat dinilai ekonomis apabila nilai dari rasio ekonomi $<100\%$, dinilai ekonomis seimbang apabila nilai dari rasio

ekonomi =100% dan dinilai tidak ekonomis apabila nilai dari rasio ekonomi >100%.

Berikut ini rumus pengukuran ekonomi:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi dalam Gabriela Thalia Wuwungan, dkk (2017)

Pengukuran rasio ekonomi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau tahun 2018 - 2019.

Tabel 4.9
Pengukuran Ekonomi
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2018

No	Program	Anggaran	Realisasi	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1	Program Pengembangan Data/Informasi	1.705.742.500,00	925.520.539,00	54,26	Ekonomis
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.507.402.900,00	4.413.212.825,00	58,78	Ekonomis
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	53.000.000,00	51.706.225,00	97,56	Ekonomis

	Keuangan				
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2.463.000.000,00	1.535.797.791,00	62,35	Ekonomis
	Jumlah	11.729.145.400,00	6.926.237.380,00	59,05	Ekonomis

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil perhitungan LAKIP tingkat rasio ekonomi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai ekonomis karena nilai dari rasio ekonomi seluruh program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau <100%.

Tabel 4.10
Pengukuran Ekonomi
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Realisasi	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1	Program Pengembangan Data/Informasi	1.285.247.800	1.152.106.300	89,64	Ekonomis
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.764.447.150	7.104.873.450	91,51	Ekonomis
3	Program Peningkatan	70.900.000	70.211.275	99,03	Ekonomis

	n Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	3.030.000.000	2.647.788.821	87,39	Ekonomis
	Jumlah	12.150.594.950	10.947.979.846	90,10	Ekonomis

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio ekonomi pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai ekonomis karena nilai dari rasio ekonomi seluruh program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau <100%.

4.2.2 Hasil Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dapat diukur dengan perbandingan antara *output* (hasil yang dicapai) dengan *input* (realisasi anggaran). Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai efisien apabila nilai dari rasio efisiensi >100%, dinilai efisien seimbang apabila nilai dari rasio efisiensi =100%, dan dinilai tidak efisien apabila <100%.

Berikut ini rumus pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo dalam Gabriela Thalia Wuwungan, dkk (2017)

Pengukuran rasio efisiensi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau tahun 2018 - 2019.

Tabel 4.11
Pengukuran Efisiensi
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2018

No	Program	Output (%)	Input (%)	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1	Program Pengembangan Data/Informasi	87	54,26	160,34	Efisien
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	87	58,78	148,00	Efisien
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	87	97,56	89,18	Tidak Efisien
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	87	62,35	139,52	Efisien
Jumlah		87	59.05	147.33	Efisien

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Provinsi Riau yaitu program pengembangan data/informasi, program perencanaan pembangunan daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dinilai efisien karena nilai dari rasio efisiensi ketiga program tersebut $>100\%$.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinilai tidak efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $<100\%$.

Tabel 4.12
Pengukuran Efisiensi
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2019

No	Program	Output (%)	Input (%)	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1	Program Pengembangan Data/Informasi	90	89,64	100,40	Efisien berimbang
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90	91,51	98,36	Tidak Efisien
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90	99,03	90,88	Tidak Efisien
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	90	87,39	102,99	Efisien
Jumlah		90	90.10	99.89	Tidak Efisiensi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.12 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan

bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu program peningkatan kapasitas kelembagaan dinilai efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut >100%. Program pengembangan data/informasi dinilai efisien berimbang karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut =100%.

Program perencanaan pembangunan daerah dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinilai tidak efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut <100%.

4.2.3 Hasil Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat diukur dengan perbandingan antara *outcome* (tujuan atau target yang hendak dicapai) dengan *output* (hasil yang dicapai). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai efektif apabila nilai dari rasio efektivitas >100%, dinilai efektif seimbang apabila nilai dari rasio efektivitas =100% dan dinilai tidak efektif apabila nilai dari rasio efektivitas <100%.

Berikut rumus pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: Dwi Purwiyanti (2017)

Tabel 4.13
Pengukuran Efektivitas
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Outcome	Output	Nilai Rasio (%)	Kriteria
----	-------------------	-------------------	---------	--------	-----------------	----------

1.	Keselarasan Perencanaan Pembangunan	-Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	87	114,94	Efektif
		-Persentase keselarasan PPAS terhadap RKPD	-	87	-	Tidak Efektif
		-Persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD	98,58	87	113,31	Efektif
		-Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD	96,33	87	110,72	Efektif
2.	Sinergitas Perencanaan Pembangunan	-Persentase tingkat sinergitas pusat dan provinsi	80	87	91,95	Tidak Efektif
		-Persentase tingkat sinergitas provinsi dan kab/kota	90,74	87	104,30	Efektif
3.	Pembangunan Yang Akuntabel	-Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap Tata Ruang	-	87	-	Tidak Efektif

		-Persentase kesesuaian program RKPD terhadap kebutuhan masyarakat	29,50	87	33,91	Tidak Efektif
Jumlah			82.53	87	94.86	Tidak Efektif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.13 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD, persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD, dan persentase tingkat sinergitas provinsi dan kab/kota dinilai efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $>100\%$.

Indikator kinerja persentase keselarasan PPAS terhadap RKPD, persentase tingkat sinergitas pusat dan provinsi, persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang, dan persentase kesesuaian program RKPD terhadap kebutuhan masyarakat dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$.

Tabel 4.14
Pengukuran Efektivitas
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Outcome	Output	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1	Keselarasan Perencanaan Pembangunan	-Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	99	90	110	Efektif
		-Persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD	98,40	90	109,33	Efektif
		-Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD	88,82	90	98,69	Tidak Efektif
2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan	-Persentase Prioritas Provinsi yang sinergis dengan prioritas pusat	80	90	88,89	Tidak Efektif
		-Persentase prioritas kab/kota yang sinergis dengan prioritas provinsi	77,47	90	86,08	Tidak Efektif
3	Pembangunan Yang Akuntabel	-Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap Tata Ruang	29,66	90	32,96	Tidak Efektif

		-Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi kewenangan Provinsi	84,82	90	94,24	Tidak Efektif
	Jumlah		79.74	90	88.60	Tidak Efektif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD dinilai efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $>100\%$.

Indikator kinerja persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD, persentase prioritas provinsi yang sinergis dengan prioritas pusat, persentase prioritas kab/kota yang sinergis dengan prioritas provinsi, persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang, dan persentase usulan musrenbang yang menjadi kewenangan Provinsi dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada tahun 2018 dan tahun 2019

dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.15
Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas
Bappeda Provinsi Riau
Tahun 2018-2019

Tahun	2018	2019
Rasio ekonomis	59.05 %	90.10 %
Kriteria	Ekonomis	Ekonomis
Rasio efisien	147.33 %	99.89 %
Kriteria	Efisien	Tidak Efisien
Rasio efektivitas	94.86 %	88.60 %
Kriteria	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau (Data yang diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.15 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio ekonomi <100% artinya, program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai ekonomis.

Berdasarkan tabel 4.15 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi >100% artinya, program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai efisien.

Sedangkan, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi $<100\%$ artinya program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efisien.

Berdasarkan tabel 4.15 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas $<100\%$ artinya, indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efektif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Pengukuran Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.9 hasil perhitungan LAKIP tingkat rasio ekonomi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* sebesar 59,05% dan tabel 4.10 hasil perhitungan LAKIP tingkat rasio ekonomi pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* sebesar 90,10% menunjukkan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai ekonomis karena nilai dari rasio ekonomi seluruh program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau $<100\%$.

Dari tabel 4.9 dan tabel 4.10 menunjukkan bahwa realisasi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran, artinya seluruh program tersebut telah melakukan penghematan dana anggaran atau menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan suatu program. Dapat dilihat bahwa program yang dilaksanakan oleh Bappeda

Provinsi Riau tahun 2018 dan tahun 2019 telah melakukan penghematan dana yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2018 program pengembangan data/informasi diberikan anggaran sebesar Rp1.705.742.500 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp925.520.539. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp780.221.961. Tahun 2019 program pengembangan data/informasi diberikan anggaran sebesar Rp1.285.247.800 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp1.152.106.300. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp133.141.500.
2. Tahun 2018 program perencanaan pembangunan daerah diberikan anggaran sebesar Rp7.507.402.900 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp4.413.212.825. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp3.094.190.075. Tahun 2019 program perencanaan pembangunan daerah diberikan anggaran sebesar Rp7.764.447.150 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp7.104.873.450. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp659.573.700.
3. Tahun 2018 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diberikan anggaran sebesar Rp53.000.000 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp51.706.225. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp1.293.775. Tahun 2019 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diberikan anggaran sebesar Rp70.900.000 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp70.211.275. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp688.725.

4. Tahun 2018 program peningkatan kapasitas kelembagaan diberikan anggaran sebesar Rp2.463.000.000 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp1.535.797.791. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp927.202.209. Tahun 2019 program peningkatan kapasitas kelembagaan diberikan anggaran sebesar Rp3.030.000.000 dan anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp2.647.788.821. Jadi, telah melakukan penghematan dana anggaran sebesar Rp382.211.179.

Oleh karena itu, pengukuran ekonomi dilakukan untuk mengetahui kinerja atas program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau tahun 2018 dan tahun 2019 dinilai ekonomis atau tidak. Suatu kegiatan operasional dinilai ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan kata lain, dana yang dianggarkan untuk menjalankan suatu program dapat melakukan penghematan dana dalam memperoleh kebutuhan program. Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai pengukuran ekonomi, Bappeda Provinsi Riau telah melakukan penghematan dana dalam memperoleh kebutuhan program.

4.3.2 Analisis Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.11 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu program pengembangan data/informasi, program perencanaan pembangunan daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dinilai efisien karena nilai dari rasio efisiensi ketiga program tersebut $>100\%$. Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai (*output*) lebih

besar nilainya dibandingkan realisasi anggaran (*input*), artinya program tersebut mencapai hasil sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan atau digunakan. Oleh karena itu program tersebut dinilai efisien.

Berdasarkan tabel 4.11 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinilai tidak efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $<100\%$. Program tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai (*output*) lebih kecil nilainya dibandingkan realisasi anggaran (*input*), artinya program tersebut belum mencapai hasil sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan atau digunakan. Oleh karena itu program tersebut dinilai tidak efisien.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018 dinilai tidak efisien yaitu program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah

tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat meningkatkan kualitas dan sistem pelaporan.

Berdasarkan tabel 4.12 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu program peningkatan kapasitas kelembagaan dinilai efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $>100\%$. Program pengembangan data/informasi dinilai efisien berimbang karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $=100\%$. Program tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai (*output*) lebih besar nilainya dibandingkan realisasi anggaran (*input*), artinya program tersebut mencapai hasil sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan atau digunakan. Oleh karena itu program tersebut dinilai efisien.

Berdasarkan tabel 4.12 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa ada dua program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $<100\%$. Program tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai (*output*) lebih kecil nilainya dibandingkan realisasi anggaran (*input*), artinya program tersebut belum mencapai hasil sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan atau digunakan. Oleh karena itu program tersebut dinilai tidak efisien.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2019 dinilai tidak efisien dan tidak efisien disebabkan karena hal ini yaitu:

1. Program perencanaan pembangunan daerah dinilai tidak efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (1) kurang meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencana, (2) kurang meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan, (3) kurang cermat dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian hasil, (4) kurang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, (5) kurang meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah.
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinilai tidak efisien karena nilai dari rasio efisiensi program tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja

ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat meningkatkan kualitas dan sistem pelaporan.

Dalam meningkatkan kualitas dan sistem pelaporan maka sistem manajemen pemerintahan diterapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Jadi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengetahui kinerja atas program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau tahun 2018 dan tahun 2019 apakah efisien atau tidak. Proses kegiatan operasional dapat dinilai efisien apabila kinerja atau program mencapai hasil yang sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan atau digunakan.

4.3.3 Analisis Pengukuran Efektivitas

Berdasarkan tabel 4.13 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD, persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD, persentase tingkat sinergitas provinsi dan kab/kota dinilai efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $>100\%$. Indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tujuan atau target yang hendak dicapai (*outcome*) lebih besar nilainya dibandingkan hasil yang dicapai (*output*), artinya indikator kinerja tersebut mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Oleh karena itu program tersebut dinilai efektif.

Berdasarkan tabel 4.13 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tujuan atau target yang hendak dicapai (*outcome*) lebih kecil nilainya dibandingkan hasil yang dicapai (*output*), artinya indikator kinerja tersebut belum mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Oleh karena itu program tersebut dinilai tidak efektif.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2018 dinilai tidak efektif dan tidak efektif disebabkan karena hal berikut ini yaitu:

1. Persentase keselarasan PPAS terhadap RKPD dinilai tidak efektif karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Persentase tingkat sinergitas pusat dan provinsi dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan karena masih terdapat prioritas daerah yang belum sinergi dengan prioritas nasional yaitu peningkatan dan penerapan nilai budaya melayu dan kehidupan beragama karena program ini merupakan prioritas terkait dengan kekhususan daerah (spesifik lokal). Penerapan nilai budaya melayu dan kehidupan beragama menjadi prioritas provinsi Riau karena terkait dengan pencapaian visi Riau 2020 yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara Tahun 2025.
3. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang tidak efektif karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena RKPD ditetapkan sebelum Perda (Peraturan Daerah) tata ruang disahkan.
4. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap kebutuhan masyarakat dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) usulan Kab/Kota yang disampaikan dalam forum musrenbang Provinsi Riau bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, (2) usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah provinsi Riau, (3) usulan yang disampaikan belum mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Berdasarkan tabel 4.14 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, persentase keselarasan RENSTRA terhadap RPJMD dinilai efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $>100\%$. Indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tujuan atau target yang hendak dicapai (*outcome*) lebih besar nilainya dibandingkan hasil yang dicapai (*output*), artinya indikator kinerja tersebut mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Oleh karena itu program tersebut dinilai efektif.

Berdasarkan tabel 4.14 hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tujuan atau target yang hendak dicapai (*outcome*) lebih kecil nilainya dibandingkan hasil yang dicapai (*output*), artinya indikator kinerja tersebut belum mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Oleh karena itu program tersebut dinilai tidak efektif.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Tahun 2019 dinilai tidak efektif dan tidak efektif disebabkan karena hal berikut ini yaitu:

1. Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (1) kegiatan di dalam Renja OPD yang tidak terdapat di dalam dokumen Renstra OPD, (2) masih terdapat OPD dalam penyusunan renja belum mempedomani Renstra, (3) kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya konsistensi antar dokumen perencanaan jangka menengah Renstra OPD dan perencanaan tahunan Renja di lingkup OPD. (4) kurangnya pengendalian oleh Bappeda Provinsi Riau dalam perencanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
2. Persentase prioritas provinsi yang sinergis dengan prioritas pusat dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan karena masih terdapat prioritas daerah yang belum sinergi dengan prioritas nasional yaitu peningkatan dan penerapan nilai budaya melayu dan kehidupan beragama karena program ini merupakan prioritas terkait dengan kekhususan daerah (spesifik lokal). Penerapan nilai budaya melayu dan kehidupan beragama menjadi prioritas provinsi Riau karena terkait dengan pencapaian visi Riau 2020 yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara Tahun 2025.

3. Persentase prioritas kab/kota yang sinergis dengan prioritas provinsi dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan karena dari dua belas Kab/Kota terdapat prioritas Provinsi Riau yang belum diimplementasikan menjadi prioritas Kab/Kota yaitu peningkatan dan penerapan nilai budaya melayu dan kehidupan beragama.
4. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap tata ruang dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan karena Bappeda Provinsi Riau belum mampu mengarahkan Perangkat Daerah terkait untuk konsisten mempedomani RT/RW Provinsi Riau yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018.
5. Persentase usulan musrenbang yang menjadi kewenangan Provinsi dinilai tidak efektif karena nilai dari rasio efektivitas indikator kinerja tersebut $<100\%$. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: 1) usulan Kab/Kota yang disampaikan dalam forum musrenbang Provinsi Riau bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, (2) usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah provinsi Riau, (3) usulan yang disampaikan belum mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dilakukan untuk mengetahui kinerja atas program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau tahun 2018 dan tahun 2019 dinilai efektif atau tidak. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan

tanggungjawabnya dalam upaya mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan perhitungan LAKIP dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa:

1. Tingkat rasio ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio ekonomi $<100\%$ artinya, program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai ekonomis.
2. Tingkat rasio efisiensi pada tahun 2018 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi $>100\%$ artinya, program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai efisien. Sedangkan, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi $<100\%$ artinya program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efisien.
3. Tingkat rasio efektivitas pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode *Value For Money* menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas $<100\%$ artinya, indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efektif.

5.2 Saran

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau disarankan untuk melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode *value for money* terhadap program-program yang telah ditetapkan agar masyarakat mengetahui kinerja Bappeda Provinsi Riau sudah ekonomis, efisien dan efektivitas.
2. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efisien karena anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka disarankan meningkatkan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja, meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan, cermat dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian hasil, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah.
3. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dinilai tidak efektif karena belum mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau target yang hendak dicapai maka disarankan menyesuaikan program terhadap kebutuhan masyarakat, melakukan pengendalian dalam perencanaan penyusunan Renja, mengajukan usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah provinsi Riau dan usulan yang disampaikan mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiati, Tri Astuti. 2011. *Analisis Value For Money Pada Kinerja di Bappeda Kabupaten Semarang* [Skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fahmi, Irham. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan Keempat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Gumanti, Tatang Ary, Moeljadi, Elok Sri Utami. 2018. *Metode Penelitian Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Indrayani, Khairunnisa. 2018. *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6 (1): 1-10.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strtaegi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit Putra Media Nusantara.
- Pandoyo, Moh. Sofyan. 2018. *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Purwiyanti, Dwi. 2019. *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Jurnal Katalogis, 5 (3): 190-200.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Cetakan Pertama. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Sekaran, Uma, Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Setiawan, A.B, W. Gusnita. 2016. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor*. Jurnal AKUNIDA. 2 (2): 14-26.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wuwungan, Gabriela Thalia, Jantje Tinangon, Sintje Rondunuwu. 2019. *Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi. 14 (4): 354-361.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.